

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEASISTENAN UTAMA MANAJEMEN MUTU
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Awidya Mahadewi
Jabatan : Kepala Keasistenan Utama Manajemen Mutu
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA KEASISTENAN UTAMA
MANAJEMEN MUTU,


Mokhammad Najih


Awidya Mahadewi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEASISTENAN UTAMA MANAJEMEN MUTU
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

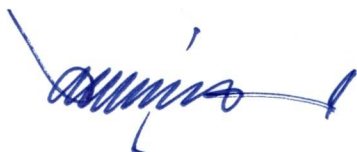
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Konsisten dan Efektif Sesuai Standar Mutu	Jumlah aduan terkait pengawasan Ombudsman yang diselesaikan	1 Aduan
	Jumlah unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu penyelesaian laporan	1 Unit kerja
	Jumlah unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu pencegahan maladministrasi	1 Unit kerja

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Manajemen Mutu ✓	
Output 1: Aduan terkait kinerja pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang diselesaikan	Rp 25.140.000
Output 2: Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan	Rp 12.720.000
Output 3: Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Terkait Pencegahan Maladministrasi	Rp 12.720.000
Total	Rp 50.580.000

Jakarta, Januari 2026

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA KEASISTENAN UTAMA
MANAJEMEN MUTU,



Mokhammad Najih



Awidya Mahadewi



DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEASISTENAN UTAMA MANAJEMEN MANAJEMEN MUTU

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Meningkatnya Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Konsisten dan Efektif Sesuai Standar Mutu	Jumlah aduan terkait pengawasan Ombudsman yang diselesaikan	1 Aduan	Merupakan keluaran atas kegiatan penyelesaian aduan masyarakat ke Ombudsman RI terhadap produk pengawasan dan jasa layanan Ombudsman yang bertujuan untuk menyelesaikan aduan terkait terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman RI sebagai wujud penegakan integritas Insan Ombudsman RI. Aduan yang dimaksud adalah aduan yang diselesaikan sampai pada tahap diterbitkannya Laporan Hasil Penyelesaian Aduan (LHPA).	Laporan Hasil Penyelesaian Aduan (LHPA)	Dihitung berdasarkan jumlah aduan masyarakat terhadap Ombudsman RI yang diselesaikan (ditutup) pada tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	Jumlah unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu penyelesaian laporan	1 Unit kerja	Merupakan keluaran atas kegiatan penjaminan mutu Unit Kerja Penyelesaian Laporan sebagai upaya untuk menjamin kegiatan Penyelesaian Laporan pengawasan pelayanan publik di lingkungan Ombudsman telah sesuai dengan sesuai dengan standar, prosedur dan peraturan yang ditetapkan dan berlaku. Unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu penyelesaian laporan adalah unit kerja penyelesaian laporan baik di kantor pusat maupaun di kantor perwakilan.	Laporan hasil pelaksanaan evaluasi penjaminan mutu penyelesaian laporan masyarakat	Dihitung berdasarkan jumlah unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu penyelesaian laporan
	Jumlah unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu pencegahan maladministrasi	1 Unit kerja	Merupakan keluaran atas kegiatan penjaminan mutu Unit Kerja Pencegahan Maladministrasi sebagai upaya untuk menjamin kegiatan Pencegahan Maladministrasi pengawasan pelayanan publik di lingkungan Ombudsman telah sesuai dengan sesuai dengan standar, prosedur	Laporan hasil pelaksanaan evaluasi penjaminan mutu pencegahan maladministrasi	Dihitung berdasarkan jumlah unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu pencegahan maladministrasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
			dan peraturan yang ditetapkan dan berlaku. Unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu pencegahan maladministrasi adalah unit kerja pencegahan maladministrasi baik di kantor pusat maupaun di kantor perwakilan.		